

ABSTRAK

ILHAM MANURUNG

Perdagangan orang dan atau dikenal dengan istilah *human trafficking* akhir-akhir ini muncul menjadi suatu masalah yang banyak diperdebatkan baik dari tingkat regional maupun global dan dikatakan sebagai bentuk perbudakan masa kini.

Penelitian ini bersifat deskriptif dengan pendekatan yuridis normatif. “Pendekatan yuridis normatif yaitu menekankan pada ilmu hukum dengan menitik beratkan pada data sekunder, yang berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tertier”, dan untuk melengkapi data dilakukan dengan mengumpulkan bahan-bahan yang relevan dan melakukan studi pustaka yang selanjutnya data akan dianalisis secara yuridis.

Sanksi pidana Pengaturan hukum terhadap penyaluran tenaga kerja migran di Indonesia yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan Menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Tata Cara Pelaksanaan Penempatan TKI Di Luar Negeri Oleh Pemerintah, Penempatan TKI hanya dapat dilakukan jika pemerintah negara tujuan telah membuat perjanjian tertulis dengan pemerintah Indonesia, atau negara tujuan memiliki peraturan perundang-undangan yang melindungi tenaga kerja asing. Perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perdagangan orang dengan anak sebagai pekerja migran Indonesia Perdagangan orang adalah bentuk dari modernisasi dari perbudakan manusia. pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan apakah benar suatu peraturan tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang dan apakah benar Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) KUHAP.

Disimpulkan bahwa Ini dimaksudkan untuk menghindari perlakuan yang tidak manusiawi terhadap TKI. Setelah Calon TKI memenuhi persyaratan yang ditentukan, maka Calon TKI wajib mengikuti serangkaian prosedur sebelum nantinya ditempatkan di luar negeri. Tata cara penempatan TKI ke luar negeri mulai diatur dari pasal 31 UU Nomor 39 Tahun 2004 Setiap warga negara mempunyai kedudukan yang sama dalam peraturan perundang-undangan baik mengenai hak maupun kewajiban sebagaimana diatur dalam pasal 28A Undang-Undang Dasar 1945 ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, TPPO, Dibawah Umur

ABSTRACT

ILHAM MANURUNG

Human trafficking and or known as human trafficking has recently emerged as a widely debated issue both regionally and globally and is said to be a form of modern slavery.

This research is descriptive with a normative legal approach. "The normative legal approach emphasizes legal science by emphasizing secondary data, in the form of primary, secondary, and tertiary legal materials", and to complete the data, relevant materials are collected and a literature study is conducted, which will then be analyzed legally.

Criminal sanctions Legal regulations for the distribution of migrant workers in Indonesia in accordance with laws and regulations According to Article 2 paragraph (1) of the Law on Procedures for the Implementation of the Placement of Indonesian Migrant Workers Abroad by the Government, the placement of Indonesian Migrant Workers can only be carried out if the government of the destination country has made a written agreement with the Indonesian government, or the destination country has laws and regulations that protect foreign workers. Legal protection for victims of human trafficking crimes with children as Indonesian migrant workers Human trafficking is a form of modernization of human slavery. examination at the cassation level only concerns whether a regulation is not implemented or is not implemented properly, or whether the method of trial is not implemented according to the provisions of the law and whether the Court has exceeded its authority as referred to in Article 253 Paragraph (1) of the Criminal Procedure Code.

It is concluded that this is intended to avoid inhumane treatment of Indonesian migrant workers. After prospective Indonesian migrant workers meet the specified requirements, prospective Indonesian migrant workers are required to follow a series of procedures before being placed abroad. The procedures for placing Indonesian migrant workers abroad are regulated from Article 31 of Law Number 39 of 2004 Every citizen has the same position in the laws and regulations regarding both rights and obligations as regulated in Article 28A of the 1945 Constitution. It turns out that the *judex facti* decision in this case does not conflict with the law and/or statutes, so the cassation application is declared rejected.

Keywords: Legal Protection, TPPO, Minors